

Islamic Values, Governance, and Poverty Alleviation: Empirical Evidence from the Perspective of Middle Eastern and North African Countries

Nilai-Nilai Islam, Tata Kelola, dan Pengentasan Kemiskinan: Bukti Empiris dari Perspektif Negara-Negara Timur Tengah dan Afrika Utara

Syafiqri Aestro Risangaji , Darwanto 

Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

syafiqri.aestro@gmail.com, darwantomsiugm@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between the Islamic Human Development Index (I-HDI), Zakat, and institutional quality in addressing poverty in the Middle East and North Africa (MENA) region. Using panel data, researchers measured the relationship of these three instruments to poverty in Algeria, Lebanon, Morocco, Egypt, and Jordan from 2011 to 2022. The results indicate that increases in I-HDI scores and institutional quality, represented by variables such as voice and accountability, regulatory quality, and control of corruption, have a significant negative impact on the poverty level. Surprisingly, Zakat was found to be insignificant. This suggests that although Zakat plays an important role in wealth redistribution and meeting the needs of vulnerable communities, challenges such as administrative inefficiencies and economic and political instability in the MENA region can diminish its impact on poverty alleviation. These findings provide important insights for policymakers in efforts to reduce poverty and promote inclusive development in the MENA region, highlighting the need for a holistic approach that considers various factors to achieve optimal results.

Keywords: Poverty, Islamic Human Development Index, Institutional Quality, Zakat

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hubungan Islamic Human Development Index (I-HDI), Zakat, serta Kualitas institusi dalam menanggulangi kemiskinan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Dengan menggunakan data panel, peneliti mengukur hubungan ketiga instrumen terhadap kemiskinan dari negara Aljazair, Lebanon, Maroko, Mesir, dan Yordania dalam kurun waktu 2011 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan skor I-HDI dan kualitas institusi, yang diwakili oleh variabel suara dan akuntabilitas, kualitas regulasi, serta kontrol korupsi memiliki dampak yang negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, secara mengejutkan Zakat ditemukan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meski Zakat berperan penting dalam redistribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang rentan, tantangan seperti inefisiensi administrasi dan ketidakstabilan ekonomi dan politik di Kawasan MENA dapat mengurangi dampaknya dalam mengatasi kemiskinan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pembangunan inklusif di Kawasan MENA, serta menyoroti perlunya pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai hasil yang optimal.

Kata Kunci: Kemiskinan, Islamic Human Development Index, Kualitas Institusi, Zakat.

Article History

Received: 02-06-2024

Revised: 10-10-2025

Accepted: 10-10-2025

Published: 13-10-2025

^{*)}Corresponding Author:
Syafiqri Aestro Risangaji

Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International License (CC-BY-NC-SA)



Copyright: ©2024 by author(s)

How to Cite: 1st Author's Last Name, X., & 2nd Author's Last Name, X.. (2024). Article Title. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Volume(Issue), Page Number. <https://doi.org/10.20473/vol11iss2024XppX-X>

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah permasalahan berdampak luas yang dapat melumpuhkan kemampuan seseorang dalam menjalani hidup. Kemiskinan didefinisikan sebagai rendahnya pendapatan per orang, minimnya akses terhadap layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, konsumsi kalori yang tidak mencukupi, serta harapan hidup yang pendek (World Bank, 2020). Kemiskinan bukanlah murni masalah kekurangan pendapatan, namun memiliki sebab yang lebih kompleks seperti keterbatasan akses terhadap tanah dan sumber daya, pengabaian daerah pedesaan demi pembangunan perkotaan, dan akses yang tidak memadai terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi (Khadar, 2014). Widiastuti et al. (2022) menyatakan bahwa indikator pembangunan manusia yang rendah, produktivitas yang terhambat, dan pendapatan nasional yang tidak mencukupi sebagai pendorong utama kemiskinan di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Adapun bila ditinjau dari persentase populasi dengan pengeluaran dibawah \$2.15 per hari, maka menunjukkan tren kemiskinan yang rata-rata menurun di dunia. Meski begitu, kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) menjadi satu-satunya wilayah dengan tren kemiskinan yang meningkat. Pada tahun 2018, tingkat jumlah penduduk miskin naik menjadi 7,2 persen, atau tumbuh tiga kali lipat bila dibandingkan dengan tahun 2014, yakni sebesar 2,6 persen (World Bank, 2020).

Di sisi lain, konsep pembangunan manusia telah menjadi landasan dalam mengevaluasi, memahami, dan menanggulangi kemiskinan, yang mendapatkan daya tarik di kalangan akademis dan pembuat kebijakan. Human Development Index (HDI), yang diperkenalkan oleh United Nations (1990), muncul sebagai tanggapan atas kekurangan ini. HDI merumuskan tiga aspek kunci kehidupan manusia: harapan hidup, tingkat literasi, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dimensi-dimensi ini mewakili pilihan inti yang dibuat manusia, yakni hidup panjang dan sehat, memperoleh pengetahuan, dan memiliki akses ke sumber daya untuk taraf hidup yang layak (UNDP, 1990).

Namun, terdapat keterbatasan dalam HDI. Meski HDI terus berkembang, ia tidak akan pernah bisa menangkap kompleksitas pembangunan manusia secara sempurna (UNDP, 1993). Pemahaman ini telah memicu banyak penelitian untuk memperbaiki konsep dan dimensi HDI untuk menciptakan gambaran yang lebih komprehensif (Salas-Bourgoin, 2014). Salah satu kritik mengarah pada kurangnya pertimbangan etika dan agama dalam HDI (Hasan & Ali, 2018). Hal ini telah mendorong pengembangan indeks seperti Islamic Human Development Indeks (I-HDI), yang memasukkan aspek-aspek tambahan tersebut.

I-HDI menilai pembangunan manusia melalui lensa Islam, berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Kerangka I-HDI menggabungkan lima dimensi utama yang melampaui aspek material murni dari I-HDI, yaitu agama (Din), diri (Nafs), intelek (Aql), keturunan (Nasl), dan harta (Mal) (Anto, 2011; Herianingrum et al., 2020; Rama & Yusuf, 2019). Pendekatan holistik ini bertujuan untuk mengukur kesejahteraan manusia secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan fisik dan moral secara seimbang. Dengan demikian, I-HDI diharapkan dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang penuh makna di dunia ini dan mempersiapkan diri untuk akhirat (mencapai falah) (Septiarini & Herianingrum, 2017). Widiastuti et al. (2022) menemukan bahwa skor I-HDI yang kuat, yang mencerminkan pembangunan manusia yang menyeluruh, merupakan faktor kunci dalam pengurangan kemiskinan untuk negara-negara anggota OKI. Adapun, studi terbaru Pew Research Center menyatakan bahwa mayoritas masyarakat di kawasan Asia-Pasifik dan MENA (70-90%) menganggap agama sangat penting dalam kehidupan mereka, menunjukkan tingkat religiusitas yang tinggi (DinarStandard, 2023). Artinya, model penilaian pembangunan ini diekspektasikan sesuai dengan kawasan MENA.

Meskipun terdapat berbagai instrumen pengentas kemiskinan, namun kualitas institusi suatu negara memegang salah satu peranan paling penting. Kualitas institusi mencakup faktor-faktor seperti penegakan hukum, hak individu, dan efektivitas peraturan serta layanan pemerintah (Edison, 2003). Kawasan MENA menghadapi tantangan kompleks, seperti ketidakstabilan politik yang tinggi dan pemerintahan yang lemah (Abed, 2003; Hakura, 2004; Shittu et al., 2022). Hal ini berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan pada akhirnya, penurunan taraf hidup (Abdelaziz & Mohamed, 2021; Awdeh & Hamadi, 2019; Emara & Jhonsa, 2014).

Zakat juga berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial yang ampuh untuk menanggulangi kemiskinan. Ia berperan sebagai bentuk jaminan sosial, yang mendistribusikan kembali kekayaan dari orang kaya kepada yang kurang mampu (Ali & Hatta, 2014; Hoque et al., 2015). Tujuan utama Zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dengan menjembatani kesenjangan kekayaan dan

memberdayakan anggota masyarakat yang paling rentan (Manurung, 2014; Rini et al., 2020). Penelitian oleh Bouanani & Belhadj (2019) menunjukkan peran Zakat yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Tunisia. Di Indonesia, dana Zakat mampu menyediakan modal penting bagi rumah tangga miskin, yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketahanan pangan (Sumai et al., 2019). Penelitian oleh Jedidia & Guerbouj (2021) menemukan korelasi yang positif antara Zakat dan pertumbuhan ekonomi di delapan negara Muslim antara tahun 2004 dan 2017. Artinya, di luar pengentasan kemiskinan secara langsung, Zakat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, Islamic Research and Training Institute mengungkapkan adanya mengungkapkan korelasi yang kuat antara pengelolaan Zakat yang efisien dan peningkatan kesadaran masyarakat di negara-negara Afrika Barat Laut (IRTI, 2020).

Disamping itu, terdapat hubungan yang jelas antara penguatan institusi dengan pengurangan kemiskinan (Aracil et al., 2022; Ouechtati, 2023; Ullah et al., 2021). Institusi yang kuat, dengan hukum kontrak yang kokoh, hak kepemilikan, dan perlindungan investor, ditambah dengan norma sosial yang baik, dapat mendorong sistem keuangan yang sehat (Islam et al., 2020). Stabilitas politik juga dapat secara positif memengaruhi ketimpangan pendapatan dalam penelitian Deyshappriya (2017). Dengan berfokus pada peningkatan kualitas institusi, negara-negara MENA dapat membuka potensi pembangunan sejati mereka dan menciptakan masa depan yang lebih adil bagi warganya.

Sementara kemiskinan di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) telah diteliti secara luas, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang kritis terkait efektivitas tiga instrumen potensial untuk menanggulangnya: Islamic Human Development Index (I-HDI), Kualitas Institusi, dan Zakat, rukun wajib dalam Islam, dalam menanggulangi kemiskinan. Studi yang ada sebagian besar berfokus pada Human Development Index (HDI) konvensional dan indikator ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut menggunakan data panel untuk menyelidiki efektivitas I-HDI, kualitas institusi, serta zakat terhadap kemiskinan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang bekerja untuk pengurangan kemiskinan dan pembangunan inklusif di kawasan MENA. Penelitian ini dapat menginformasikan strategi yang memanfaatkan kekuatan unik nilai-nilai Islam yang terkandung dalam I-HDI dan Zakat, bersama dengan struktur tata kelola yang kuat, untuk menciptakan masa depan yang lebih adil bagi penduduk kawasan tersebut.

II. KAJIAN LITERATUR

Islamic Human Development Index (I-HDI)

Indeks Pembangunan Manusia Islami (I-HDI) merupakan konsep baru yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengukur kemajuan manusia dalam konteks nilai-nilai Islam. Ia merupakan sebuah indeks pembangunan manusia yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yang didalamnya mencakup lima dimensi utama yakni agama (Din), diri (Nafs), intelek (Aql), keturunan (Nasl), dan harta (Mal) (Anto, 2011; Herianingrum et al., 2020; Rama & Yusuf, 2019). Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan yang signifikan antara I-HDI dan tingkat kemiskinan. Penelitian oleh Aiu Viollani et al. (2022), Jatmiko & Azizon (2022), dan Widiastuti et al. (2022) secara konsisten menemukan bahwa I-HDI memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan I-HDI dikaitkan dengan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan temuan penelitian terdahulu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Islamic Human Development Index (I-HDI) berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

Zakat

Zakat merupakan instrumen dalam keuangan sosial Islam yang berperan sebagai jaminan sosial yang mendistribusikan kembali kekayaan dari orang kaya kepada yang kurang mampu (Ali & Hatta, 2014; Hoque et al., 2015). Ia bertujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dengan menjembatani kesenjangan kekayaan dan memberdayakan masyarakat rentan (Manurung, 2014; Rini et al., 2020). Banyak penelitian yang membahas mengenai dampak positif Zakat terhadap kemiskinan. Penelitian Bouanani & Belhadj (2019) di Tunisia menunjukkan peran signifikan Zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Di Indonesia, dana Zakat terbukti menyediakan modal penting bagi rumah tangga miskin, berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketahanan pangan (Sumai et al., 2019). Penelitian oleh Jedidia & Guerbouj (2021) menemukan hubungan positif antara Zakat dan pertumbuhan ekonomi di

delapan negara Muslim antara tahun 2004 dan 2017. Efek ini dikaitkan dengan penggunaan dana Zakat untuk meningkatkan konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Oleh karenanya, dirumuskan hipotesis berikut:

H2: Zakat berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan Kualitas Institusi

Sebagai pemegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, kualitas insitusi haruslah dapat dinilai dan diukur menggunakan indikator yang jelas, salah satunya melalui Worldwide Governance Indicators (WGI). Ia adalah kumpulan dari enam dimensi luas tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada persepsi para ahli dan survei terhadap (Kaufmann & Kraay, 2023):

1. Suara dan Akuntabilitas (Voice and Accountability / VA): Indikaotr ini mencerminkan sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk kebebasan berekspres, bereksosiasi, dan mendapat akses terhadap media bebas.
2. Stabilitas Politik dan Tidak Adanya Kekerasan / Terorisme (Political Stability and Absence of Violence / PSAV): indikator yang mengukur persepsi tentang stabilitas politik dan keamanan, termasuk kemungkinan terjadinya kudeta, kekerasan politik, dan terorisme.
3. Efektivitas Pemerintahan (Government Effectiveness / GE): indikator yang menilai kualitas layanan publik, kompetensi aparatur sipil negara, dan keefektifan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.
4. Kualitas Regulasi (Regulatory Quality / RQ): indikator yang mengukur kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan regulasi yang kondusif bagi perkembangan sektor swasta.
5. Supremasi Hukum (Rule of Law / RL): indikator yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakannya, termasuk efektivitas kontrak, perlindungan hak milik, dan independensi aparat penegak hukum.
6. Kontrol Korupsi (Control of Corruption / CC): indikator yang mengukur tingkat korupsi di sektor publik, baik dalam bentuk penyuapan kecil maupun besar, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Penelitian oleh Akobeng (2020), Janiar & Soelistyo (2017), dan Rizqi & Kartika (2022) menunjukkan bahwa institusi yang baik dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi usaha kecil dan menengah. Hal ini pada akhirnya dapat membantu mengurangi kemiskinan. Artinya, semakin baik kualitas institusi, semakin rendah tingkat kemiskinan. Disamping itu, beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan pengaruh negatif dari kualitas institusi terhadap kemiskinan (Aracil et al., 2022; Ouechtati, 2023; Ullah et al., 2021). Berdasarkan temuan penelitian terdahulu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Voice and Accountability berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

H4: Political Stability and Absence of Violence berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

H5: Government Effectiveness berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

H6: Regulatory Quality berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

H7: Rule of Law berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

H8: Control of Corruption berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji hubungan antara I-HDI, zakat, dan tata kelola pemerintahan terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Timur Tengah Afrika Utara (MENA) pada periode tahun 2012-2022. Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel yang digunakan. Metode ini metode pemilihan sampel yang melibatkan pemilihan responden tertentu dengan potensi tertinggi untuk memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan peneliti (Campbell et al., 2020).

Adapun, kriteria-kriteria sampel negara yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Berada di Kawasan MENA; Memiliki populasi mayoritas muslim; Memiliki tingkat pendapatan rendah, menengah kebawah, dan menengah keatas; Memiliki data statistik instrumen Ekonomi yang terpublikasi lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut, 5 dari 19 negara di Kawasan MENA dipilih, antara lain Aljazair, Lebanon, Maroko, Mesir, dan Yordania.

Dalam penelitian ini, Islamic Human Development Index (I-HDI), Zakat, serta Kualitas Institusi sebagai variabel independen terhadap kemiskinan sebagai variabel dependen. Variabel I-HDI kemudian

terbagi menjadi lima indikator yang masing-masing menggambarkan pemenuhan tujuan-tujuan pokok syariah antara lain diin, nafs, nasl, aql, dan mal.

Langkah berikutnya dalam pengembangan I-HDI adalah pengindeksan menggunakan pendekatan nilai minimum dan maksimum. Nilai minimum dan maksimum ditetapkan untuk mengonversi indikator yang dinyatakan dalam berbagai satuan menjadi indeks yang berkisar dari 0 hingga 1. Rumus pendekatan nilai maksimum dan minimum adalah sebagai berikut:

Indeks indikator = (nilai aktual - nilai minimum) / (nilai maksimum - nilai minimum)

Setelah mengindeks nilai minimum dan maksimum dari indikator untuk setiap dimensi, nilai I-HDI dihitung dengan menggabungkan nilai indeks lima dimensi. Nilai I-HDI dihitung menggunakan rumus berikut:

I-HDI = (20% * indeks din) + (20% * indeks nafs) + (20% * indeks aql) + (20% * indeks nasl) + (20% * indeks mal).

Penelitian ini menggunakan metode Indeks Bobot Sederhana (SWI) untuk menghitung indeks indikator I-HDI dan persentase dari setiap dimensi. SWI adalah metode yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis Zakat (Puskas) Lembaga Zakat Pemerintah Indonesia. SWI adalah metode pengambilan atribut ganda di mana bobot pada setiap dimensi yang telah ditentukan sebelumnya dikalikan dengan bobot variabel yang kemudian ditambahkan bersama. Penelitian ini menetapkan persentase untuk setiap dimensi sebesar 20% di mana jumlah total dimensi adalah 5 untuk mendapatkan persentase 100%. Skor I-HDI berkisar dari 0 hingga 1, dengan skor yang lebih dekat ke 1 menunjukkan perkembangan manusia yang lebih baik dan skor yang lebih dekat ke 0 menunjukkan perkembangan manusia yang buruk. I-HDI dalam penelitian ini dibagi menjadi empat kategori berdasarkan pengelompokan HDI.

Tabel 1. Kategori I-HDI

Kategori	Skor
Sangat Tinggi	0,80 – 1,00
Tinggi	0,70 – 0,79
Sedang	0,55 – 0,7
Rendah	< 0,55

Adapun, karena keterbatasan data, tingkat zakat yang diteliti dalam penelitian ini dihitung menggunakan estimasi sebagai berikut:

Tingkat Zakat: 2,5% * Pembentukan Modal Bruto

Penulis menggunakan tingkat 2,5% karena merupakan tingkat zakat maal dan merujuk pada sejumlah penelitian sebelumnya (Bouanani & Belhadj, 2019, 2020; Mahat & Warokka, 2013; Shaukat & Zhu, 2021). Data tentang pembentukan modal bruto (dalam Dolar AS saat ini) diperoleh dari publikasi World Bank. Sementara itu, tingkat kemiskinan diwakili oleh perkiraan persentase penduduk yang hidup di bawah ambang kemiskinan sebesar US \$ 2,15 per hari yang diperoleh dari database Sustainable Development Report.

Sedangkan variabel kualitas institusi memiliki enam indikator, yakni Suara dan Akuntabilitas (Voice Accountability/VA), Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan/Terrorisme (Political Stability and Absence of Violence/PV), Efektivitas Pemerintahan (Government Effectiveness/GE), Kualitas Kebijakan (Regulatory Quality/RQ), Aturan Hukum (Rule of Law/RL), Kontrol Korupsi (Control of Corruption/CC). Adapun, rincian dari masing-masing variabel dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Satuan	Sumber Data
Islamic Human Development Index (I-HDI)	Diin (agama)	Pembunuhan yang disengaja (intentional homicides) / 100.000 populasi	WDI, UN Data
	Nafs (jiwa)	Tingkat harapan hidup saat lahir (life expectancy at birth)	SESRIC, UN Data
	Aql (akal)	Akses pendidikan dasar (primary school enrolment)	SESRIC, UN Data
	Nasl (keturunan)	Tingkat kematian balita (mortality rate under 5 per 1000 birth)	SESRIC, UN Data
	Mal (harta)	Tingkat pendapatan (GDP per capita (US\$))	WDI
Zakat	Zakat Rate	Gross Capital Formation (Current US\$) X 2,5%	WDI

Kualitas Institusi	Suara dan akuntabilitas	Tingkat keterlibatan militer dalam politik dan akuntabilitas demokratis	WGI
	Stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan / terorisme	Stabilitas pemerintah, konflik internal, konflik eksternal dan ketegangan etnis	WGI
	Efektifitas pemerintahan	Kualitas birokrasi	WGI
	Kualitas regulasi	Profil investasi	WGI
	Supremasi hukum	Penegakan hukum	WGI
	Kontrol korupsi	Tingkat korupsi	WGI

Studi ini menggunakan data panel untuk mengkaji hubungan I-HDI, Zakat, dan Kualitas Institusi terhadap Kemiskinan di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Penelitian ini menggunakan total 780 data dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Sumber data berasal dari database World Bank (World Development Indicator (WDI) dan World Government Indicator (WGI)), UN Data, Sustainable Development Report, serta database Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC). Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \beta_7 X_{7it} + \beta_8 X_{8it} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

α = Konstanta

Y = Jumlah penduduk miskin

X1 = I-HDI

X2 = Zakat

X3 = Voice and Accountability

X4 = Political Stability and Absence of Violence

X5 = Government Effectiveness

X6 = Regulatory Quality

X7 = Rule of Law

X8 = Control of Corruption

ϵ = Koefisien pengganggu / random error

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data statistik pada Tabel 3, dari lima negara memiliki rata-rata skor I-HDI sebesar 0,51 yang berarti mereka memiliki rata-rata skor I-HDI yang rendah. Disamping itu, rata-rata nilai dari indeks kualitas institusi memiliki nilai dibawah 0, yang juga menunjukkan rendahnya kualitas institusi kelima negara tersebut. Adapun, terdapat rata-rata perolehan zakat sebesar US\$ 936 juta.

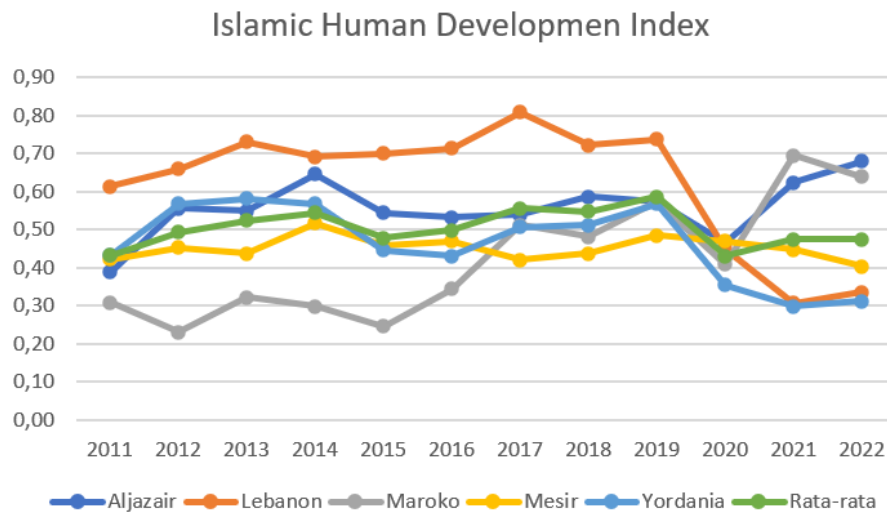
Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Mean	1.26	0.51	936031326.24	-0.82	-0.97	-0.35	-0.47	-0.42	-0.50
Median	0.90	0.50	921294340.08	-0.75	-1.03	-0.38	-0.37	-0.46	-0.58
Maximum	4.16	0.81	2438854211.88	-0.39	-0.27	0.20	0.31	0.47	0.25
Minimum	0.37	0.23	30993819.65	-1.51	-1.70	-1.46	-1.39	-1.10	-1.25
Std. Dev.	1.01	0.14	692957454.80	0.28	0.51	0.35	0.51	0.43	0.40

Islamic Human Development Indeks

I-HDI merupakan indeks komposit yang mengukur pencapaian rata-rata pembangunan manusia yang didasarkan pada lima dimensi maqashid syariah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nilai indeks untuk semua negara berada dalam kisaran 0,23 hingga 0,81, dengan variasi yang signifikan selama bertahun-tahun. Pada kawasan MENA, terdapat tren berfluktuasi untuk masing-masing negara, menunjukkan perubahan dinamis dalam status pembangunan manusia mereka selama periode tersebut.

Di kawasan MENA, tren I-HDI menunjukkan dinamika yang menarik. Aljazair menunjukkan peningkatan yang signifikan, mulai dari 0,39 pada tahun 2011 dan mencapai 0,68 pada tahun 2022, menunjukkan kemajuan yang stabil dalam pembangunan manusia. Di sisi lain, Lebanon mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Ia secara konsisten menempati peringkat tertinggi di antara lima negara, dimulai dari skor sebesar 0,61 pada 2011 dan memuncak di angka 0,81 pada 2017. Namun, terdapat penurunan tajam mulai tahun 2019, yang kemudian turun menjadi 0,34 pada tahun 2022. Penurunan ini kemungkinan besar mencerminkan krisis sosial-ekonomi dan politik yang melanda negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 1. Skor I-HDI di lima negara Kawasan MENA

Maroko menunjukkan peningkatan yang substansial, dari skor sebesar 0,31 pada tahun 2011 menjadi 0,69 pada tahun 2021. Namun, I-HDI Maroko mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022, mencapai 0,64. Sementara itu, Mesir menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, dari 0,42 pada 2011 menjadi 0,40 pada 2022, mencerminkan upaya untuk menstabilkan pembangunan pasca-Musim Semi Arab. Adapun Yordania menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2011 hingga dan memuncak di skor 0,57 pada 2019. Namun, I-HDI Yordania mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021, turun menjadi 0,30. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakstabilan regional dan pandemi COVID-19.

Rata-rata I-HDI di lima negara Kawasan MENA menunjukkan fluktuasi yang kecil, mulai dari skor 0,43 pada tahun 2011 hingga puncaknya di 0,59 pada tahun 2019, sebelum kembali turun ke 0,47 pada tahun 2022. Penurunan Lebanon dan Yordania baru-baru ini menggarisbawahi kerapuhan pembangunan manusia di tengah krisis politik dan ekonomi, sementara perbaikan Aljazair dan Maroko mencerminkan kebijakan pembangunan yang sukses. Tren stabil Mesir menunjukkan upaya konsisten untuk meningkatkan hasil pembangunan manusia. Meskipun terdapat perubahan di masing-masing negara, perkembangan regional secara keseluruhan tetap relatif stabil, meski terjadi sedikit penurunan baru-baru ini, yang kemungkinan disebabkan oleh bencana global seperti pandemi.

Hasil Regresi

Penelitian ini menggunakan data panel dengan model fixed effect. Hasil dari uji regresi ditunjukkan pada Tabel 4 dengan model yang bebas dari asumsi klasik.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/14/24 Time: 12:57				
Sample: 2011 2022				
Periods included: 12				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.009361	0.005402	-1.732978	0.0897
X2	-0.005093	0.003659	-1.391935	0.1705
X3	-0.012766	0.007346	-1.737918	0.0888
X4	-0.002607	0.004525	-0.576250	0.5672
X5	0.020298	0.004927	4.119921	0.0002
X6	-0.018850	0.005383	-3.501496	0.0010
X7	0.009148	0.007705	1.187293	0.2411
X8	-0.019169	0.007779	-2.464123	0.0174
C	0.001714	0.010714	0.160021	0.8736

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.866994	Mean dependent var	0.012647
Adjusted R-squared	0.833035	S.D. dependent var	0.010120
S.E. of regression	0.004135	Akaike info criterion	-7.949523
Sum squared resid	0.000804	Schwarz criterion	-7.495748
Log likelihood	251.4857	Hannan-Quinn criter.	-7.772027
F-statistic	25.53070	Durbin-Watson stat	1.189153
Prob(F-statistic)	0.000000		

Penelitian ini menemukan bahwa variabel X1, yakni I-HDI memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap variabel Y pada taraf signifikansi 10%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan skor I-HDI dapat menurunkan kemiskinan secara signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Aiu Viollani et al. (2022), Jatmiko & Azizon (2022), dan Widiastuti et al. (2022). I-HDI yang tinggi menunjukkan kualitas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang tinggi pula. Hal ini dapat mendorong terciptanya individu-individu yang sehat, berpendidikan, dan produktif, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.

Disamping itu, variabel kualitas institusi yang diwakili oleh variabel X3, variabel X6, variabel X8 mempengaruhi kemiskinan secara negatif signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Aracil et al. (2022), Ouechtati (2023), dan Ullah et al. (2021), dimana institusi yang kuat, terlebih suara dan akuntabilitas, kualitas regulasi, serta kontrol korupsi, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara, yang kemudian dapat mengurangi kemiskinan.

Masyarakat memainkan peran penting dalam mengawasi tindakan pemerintah dan memperjuangkan hak-hak orang miskin. Suara dan akuntabilitas yang tinggi memberi masyarakat tempat untuk menyuarakan kebutuhan mereka, membuat mereka mampu untuk memobilisasi sumber daya, meningkatkan kesadaran, dan mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin secara efektif (Cornwall, 2014; Fox, 2015).

Peraturan yang baik dapat membantu mencegah korupsi, monopoli, dan praktik bisnis yang tidak adil. Selain itu, peraturan yang efektif juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keterbukaan pasar, kesejahteraan sosial, sistem keuangan yang sehat, perlindungan lingkungan, perdagangan luar negeri, dan pengembangan bisnis (Bahaudin G. Mujtaba et al., 2018; Kaufmann & Kraay, 2002). Hal ini dapat mengarah kepada pengurangan kemiskinan.

Ketika korupsi merajalela, investor dan pengusaha menjadi enggan untuk berinvestasi, yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, lingkungan yang transparan dan bebas korupsi mendorong investasi domestik dan asing, yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pada akhirnya, pengurangan kemiskinan (Kaufmann & Kraay, 2010). Selain mendorong investasi, pengendalian korupsi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan membangun kepercayaan pada institusi (Besley & Burgess, 2002). Ketika masyarakat mempercayai pemerintah dan lembaga lainnya, mereka lebih cenderung terlibat dalam kegiatan ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan secara keseluruhan, yang pada akhirnya mengarah pada pengurangan kemiskinan (Rothstein & Teorell, 2008).

Adapun, ditemukan variabel X2, X4, dan X7 tidak mempengaruhi kemiskinan secara signifikan. Variabel X2, yakni zakat memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, namun tidak signifikan. Temuan ini berbeda dengan penelitian oleh Widiastuti et al. (2022). Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti inefisiensi, kurangnya koordinasi dan transparansi administrasi zakat serta adanya tantangan sosial-ekonomi di MENA, seperti angka pengangguran, inflasi, dan ketidakstabilan politik yang tinggi (Ayuniyyah et al., 2022; Jedidia & Guerbouj, 2021). Tak hanya itu, adanya sifat informal dalam pengumpulan dan penyaluran zakat di Kawasan MENA dapat menyebabkan distribusi yang tidak merata, sehingga menyebabkannya tak terintegrasi dengan strategi pengentasan kemiskinan nasional, yang pada akhirnya juga akan mengurangi efektivitas keseluruhan zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan secara sistematis (Ayuniyyah et al., 2022). Disamping itu, indikator yang ditentukan dalam penelitian ini, yakni 2,5% dikali Gross Capital Formation mungkin tidak dapat merepresentasikan zakat secara sempurna. Meskipun zakat secara teoritis memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan, dampaknya di MENA masih terbatas. Diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan terintegrasi terhadap pengelolaan zakat serta fokus pada strategi pengentasan kemiskinan secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas zakat dalam memerangi kemiskinan.

Variabel X4 yakni stabilitas politik dan tidak adanya terorisme, serta variabel X7 supremasi hukum juga ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dapat diakibatkan oleh stabilitas politik yang rapuh dan kurangnya kebijakan yang efektif. Inefisiensi birokrasi dan kurangnya inovasi kebijakan, berkontribusi pada kegagalan strategi pengentasan kemiskinan (Cammett et al., 2018). Konflik yang sering terjadi di kawasan ini juga memperburuk situasi, karena mengalihkan fokus dari pembangunan ekonomi ke keamanan dan rekonstruksi pasca-konflik (Loewe et al., 2021). Meskipun terdapat perbaikan dalam supremasi hukum, dampaknya terhadap kemiskinan dapat dibatasi jika tidak ada kebijakan yang inklusif dan menyasar kebutuhan kelompok miskin dan marginal (Cammett et al., 2018). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terfokus dan inovatif untuk mengatasi kemiskinan di kawasan MENA, dengan mempertimbangkan faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks.

Meski begitu, terdapat temuan mengejutkan dari variabel X5 yakni efektivitas pemerintahan yang mempengaruhi kemiskinan secara positif signifikan. Terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa efektivitas pemerintah di kawasan MENA dapat secara paradoks meningkatkan kemiskinan. Pertama, ketimpangan pendapatan yang tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperparah kemiskinan, meskipun pemerintah menjalankan program dengan efektif (Ncube et al., 2014). Kedua, kaum muda di MENA terpinggirkan dari rancangan kebijakan, sehingga kemiskinan multidimensi mereka tetap tinggi (Ozdamar & Giovanis, 2019). Ketiga, ketergantungan pada bantuan luar negeri dan remitansi tanpa perbaikan tata kelola pemerintahan justru memperpanjang siklus kemiskinan (Khan et al., 2022). Keempat, terdapat faktor lain seperti jumlah penduduk dan inflasi lebih dominan (Neaime & Gaysset, 2018). Kesimpulannya, efektivitas pemerintah di MENA harus diiringi dengan implementasi kebijakan yang adil dan merata untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang signifikan.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan terkait efektivitas tiga instrumen dalam menanggulangi kemiskinan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA): Islamic Human Development Index (I-HDI), Zakat, dan Kualitas Institusi yang merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi dalam Islam. Berdasarkan analisis data panel dari lima negara di kawasan MENA antara tahun 2011 hingga 2022, temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan skor I-HDI memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat memengaruhi positif pada pengurangan kemiskinan, sesuai dengan temuan penelitian terdahulu.

Selain itu, kualitas institusi, khususnya dalam hal suara dan akuntabilitas, kualitas regulasi, dan kontrol korupsi, juga terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, menegaskan bahwa institusi yang kuat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun, penelitian menemukan bahwa Zakat, meskipun memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan, tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Zakat memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang rentan, tantangan seperti inefisiensi administrasi dan ketidakstabilan ekonomi dan politik di kawasan MENA dapat mengurangi dampaknya dalam mengatasi kemiskinan. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pembangunan inklusif di kawasan MENA, serta menyoroti pentingnya memperkuat kualitas institusi dan peningkatan I-HDI sebagai strategi efektif dalam mengatasi tantangan kemiskinan.

KONTRIBUSI PENULIS

Konseptualisasi, S.R. dan D.D.; metodologi, S.R.; perangkat lunak, S.R.; validasi, S.R., D.D.; analisis formal, S.R.; investigasi, S.R.; sumber daya, S.R.; kurasi data, S.R.; penulisan – persiapan draf asli, S.R.; penulisan – telaah dan penyuntingan, S.R., D.D.; visualisasi, S.R.; supervisi, S.R.; administrasi proyek, S.R.; perolehan dana, D.D. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi naskah yang dipublikasikan.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

PERNYATAAN PERSETUJUAN YANG DIINFORMASIKAN

Not applicable (penelitian yang tidak melibatkan manusia).

PERNYATAAN KETERSEDIAAN DATA

Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia atas permintaan dari penulis terkait. [SAR].

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah dan terimakasih saya ucapkan kepada tim JESTT Unair yang telah menerbitkan artikel ini. Serta kepada Bapak Daranto selaku dosen yang telah membimbing dan memberikan arahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelaziz, S., & Mohamed, E. A. (2021). Institutional Quality and Economic Growth (An Empirical Analysis on MENA Region), 325–354.
- Abed, G. T. (2003). Unfulfilled Promise: Why the Middle East and North Africa Region Has Lagged in Growth and Globalization. *Finance and Development*, 40(1), 10–14.
- Aiu Viollani, K., Siswanto, S., & Suprayitno, E. (2022). Pengaruh islamic human development index dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel intervening. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5233–5244. doi:10.32670/fairvalue.v4i11.1855
- Akobeng, E. (2020). Harnessing foreign aid for the poor: role of institutional democracy. *Journal of Economic Studies*, 47(7), 1689–1710. doi:10.1108/JES-05-2019-0225
- Ali, I., & Hatta, Z. A. (2014). Zakat as a poverty reduction mechanism among the muslim community: Case study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 8(1), 59–70. doi:10.1111/aswp.12025
- Anto, M. H. (2011). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies*, 19(2), 69–95.
- Aracil, E., Gómez-Bengoechea, G., & Moreno-de-Tejada, O. (2022). Institutional quality and the financial inclusion-poverty alleviation link: Empirical evidence across countries. *Borsa Istanbul Review*, 22(1), 179–188. doi:10.1016/j.bir.2021.03.006
- Awdeh, A., & Hamadi, H. (2019). Factors hindering economic development: evidence from the MENA countries. *International Journal of Emerging Markets*, 14(2), 281–299. doi:10.1108/IJoEM-12-2017-0555
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Saad, N. M., & Ariffin, M. I. (2022). The impact of zakat in poverty alleviation and income inequality reduction from the perspective of gender in West Java, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(5), 924–942. doi:10.1108/IMEFM-08-2020-0403
- Bahaudin G. Mujtaba, D. B. A., McClelland, B., Williamson, P., Khanfar, N., & Frank J. Cavico, J. D. (2018). An Analysis of the Relationship between Regulatory Control and Corruption based on Product and Market Regulation and Corruption Perceptions Indices. *Business Ethics and Leadership*, 2(3), 6–20. doi:10.21272/bel.2(3).6-20.2018
- Besley, T., & Burgess, R. (2002). The Political Economy of Government Responsiveness : Theory and Evidence from India. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(4), 1415–1451.
- Bouanani, M., & Belhadj, B. (2019). Zakat and Poverty Alleviation in Tunisia Using the Fuzzy Approach. *Journal of Quantitative Economics*, 17(2), 421–432. doi:10.1007/s40953-019-00154-2
- Bouanani, M., & Belhadj, B. (2020). Does Zakat reduce poverty? Evidence from Tunisia using the Fuzzy Approach. *Metroeconomica*, 71(4), 835–850. doi:10.1111/meca.12304
- Cammett, M., Diwan, I., Richards, A., & Waterbury, J. (2018). A political economy of the middle east. In *A Political Economy of the Middle East* (Issue June). doi:10.4324/9780429492600
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. doi:10.1177/1744987120927206

- Cornwall, A. (2014). Women's Empowerment: What Works? *Journal of International Development*, 28(3), 342–359. doi:10.1002/jid.3210
- Deyshappriya, N. P. R. (2017). Impact of Macroeconomic Factors on Income Inequality and Income Distribution in Asian Countries. *Asian Development Bank Institute*, 696, 1–16.
- DinarStandard. (2023). State of the Global Islamic Economy Report. Retrieved from <https://salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE23>
- Edison, H. (2003). Testing the links: How strong are the links between institutional quality and economic performance? *Finance and Development*, 40(2), 35–37.
- Emara, N., & Jhonsa, E. (2014). Governance and economic growth: interpretations for MENA Countries. *Topics in Middle E Astern and African Economies*, 16(2), 164–183.
- Fox, J. A. (2015). Social Accountability: What Does the Evidence Really Say? *World Development*, 72, 346–361. doi:10.1016/j.worlddev.2015.03.011
- Hakura, D. (2004). Growth in the Middle East and North Africa. *IMF Working Papers*, 04(56), 1. doi:10.5089/9781451847734.001
- Hasan, H., & Ali, S. S. (2018). Measuring deprivation from Maqāsid al-Sharīah dimensions in OIC countries: Ranking and policy focus. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(1), 3–26. doi:10.4197/Islec.31-1.1
- Herianingrum, S., Ernayani, R., Seto, H., Rayandono, M. N. H., & Fauzy, M. Q. (2020). The impact of zakat, education expenditure, and health expenditure towards poverty reduction. *Sys. Rev. Pharm*, 11(12), 235–239.
- Hoque, N., Khan, M. A., & Mohammad, K. D. (2015). Poverty alleviation by Zakah in a transitional economy: a small business entrepreneurial framework. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 5(1). doi:10.1186/s40497-015-0025-8
- IRTI. (2020). *Islamic social finance report*. [irti.org>product>islamic-social-finance-report-2020](http://irti.org/product/islamic-social-finance-report-2020)
- Islam, M. A., Khan, M. A., Popp, J., Sroka, W., & Oláh, J. (2020). Financial development and foreign direct investment-the moderating role of quality institutions. *Sustainability (Switzerland)*, 12(9). doi:10.3390/SU12093556
- Janiar, L. V., & Soelistyo, A. (2017). Analisis Penguatan Peran Kelembagaan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(3), 352–364.
- Jatmiko, W., & Azizon, A. (2022). Can religious values reinvigorate the links between development and falāh? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 32–53. doi:10.1108/JIABR-08-2020-0234
- Jedidia, K. Ben, & Guerbouj, K. (2021). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. *International Journal of Development Issues*, 20(1), 126–142. doi:10.1108/IJDI-05-2020-0100
- Kaufmann, D., & Kraay, A. (2002). Growth without Governance. In *Economía* 3(1). doi:10.1353/eco.2002.0016
- Kaufmann, D., & Kraay, A. (2010). The Worldwide Governance Indicators Methodology and Analytical Issues. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>
- Kaufmann, D., & Kraay, A. (2023). Worldwide Governance Indicators 2023. Retrieved from www.govindicators.org
- Khadar, M. A. (2014). Poverty Alleviation: Causes , Measures and Islamic Solutions with Special Emphasizes on Reducing Wastages. *International Symposium of SEUSL*, 54–58.
- Khan, R., Zeeshan, Haque, M. I., Gupta, N., Tausif, M. R., & Kaushik, I. (2022). How Foreign Aid and Remittances Affect Poverty in MENA countries? *PLoS ONE*, 17(1), 1–20. doi:10.1371/journal.pone.0261510
- Loewe, M., Zintl, T., & Houdret, A. (2021). The social contract as a tool of analysis: Introduction to the special issue on “Framing the evolution of new social contracts in Middle Eastern and North African countries.” *World Development*, 145(xxxx), 104982. doi:10.1016/j.worlddev.2020.104982
- Mahat, N. I., & Warokka, A. (2013). Investigation on Zakat as an Indicator for Moslem Countries' Economic Growth. *Journal for Global Business Advancement*, 6(1), 50–58. doi:10.1504/JGBA.2013.053478
- Manurung, S. (2014). Islamic Religiosity and Development of Zakat Institution. *Qudus International*

- Journal of Islamic Studies*, 1(2), 197–220. doi:10.21043/QIJS.V1I2.186
- Ncube, M., Anyanwu, J. C., & Hausken, K. (2014). Inequality, Economic Growth and Poverty in the Middle East and North Africa (MENA). *African Development Review*, 26(3), 435–453. doi:10.1111/1467-8268.12103
- Neaime, S., & Gaysset, I. (2018). Financial inclusion and stability in MENA: Evidence from poverty and inequality. *Finance Research Letters*, 24, 230–237. doi:10.1016/j.frl.2017.09.007
- Ouechtati, I. (2023). Financial Inclusion, Institutional Quality, and Inequality: An Empirical Analysis. *Journal of the Knowledge Economy*, 14(2), 620–644. doi:10.1007/s13132-022-00909-y
- Ozdamar, O., & Giovanis, E. (2019). Youth Multidimensional Poverty and Its Dynamics: Evidence from Selected Countries in the MENA Region. In *Journal of Poverty*. doi:10.1080/10875549.2020.1869658
- Rama, A., & Yusuf, B. (2019). Construction of Islamic human development index. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 32(1), 43–64. doi:10.4197/Islec.32-1.3
- Rini, R., Fatimah, F., & Purwanti, A. (2020). Zakat and poverty: An Indonesian experience. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(11), 759–770.
- Rizqi, I. P., & Kartika, A. G. (2022). Analisis Tata Kelola Pemerintah terhadap Kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(2), 263–272.
- Rothstein, B., & Teorell, J. (2008). What is quality of government? A theory of impartial government institutions. *Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions*, 21(2), 165–190. doi:10.1111/j.1468-0491.2008.00391.x
- Salas-Bourgoin, M. A. (2014). A proposal for a modified Human Development Index. *CEPAL Review*, 2014(112), 29–44. doi:10.18356/ea3f94ea-en
- Septiarini, M. M., & Herianingrum, S. (2017). Analisis I-HDI (Islamic-Human Development Index) di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(5), 381–395.
- Shaukat, B., & Zhu, Q. (2021). Finance and growth: Particular role of Zakat to levitate development in transition economies. *International Journal of Finance and Economics*, 26(1), 998–1017. doi:10.1002/ijfe.1832
- Shittu, W. O., Musibau, H. O., & Jimoh, S. O. (2022). The complementary roles of human capital and institutional quality on natural resource - FDI—economic growth Nexus in the MENA region. *Environment, Development and Sustainability*, 24(6), 7936–7957. doi:10.1007/s10668-021-01767-5
- Sumai, S., Mutmainnah, A. N., Nurhamdah, & Arsyad, M. (2019). Role of zakat in poverty reduction and food security. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1). doi:10.1088/1755-1315/343/1/012254
- Ullah, A., Kui, Z., Ullah, S., Pinglu, C., & Khan, S. (2021). Sustainable utilization of financial and institutional resources in reducing income inequality and poverty. *Sustainability (Switzerland)*, 13(3), 1–25. doi:10.3390/su13031038
- UNDP. (1990). Human Development Report 1990. doi:10.21003/EA.V184-03
- UNDP. (1993). Human Development Report 1993: People's participation. Retrieved from <http://www.hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1993>
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Zulaikha, S., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Atiya, N. (2022). The nexus between Islamic social finance, quality of human resource, governance, and poverty. *Heliyon*, 8(12), e11885. doi:10.1016/j.heliyon.2022.e11885
- World Bank. (2020). Poverty And Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*: Vol. 3678 LNBI. World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1602-4